

SKRIPSI

***OPEN DOOR POLICY* TERHADAP KRISIS MIGRAN
EROPA DI JERMAN (2015-2019)**



**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Kajian Perbatasan**

Oleh :

Rinaldo Farera
NIM. E1111161033

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2023**

SKRIPSI

***OPEN DOOR POLICY* TERHADAP KRISIS MIGRAN
EROPA DI JERMAN (2015-2019)**

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Kajian Perbatasan**

Oleh :

Rinaldo Farera
NIM. E1111161033

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

OPEN DOOR POLICY TERHADAP KRISIS MIGRAN EROPA DI JERMAN (2015-2019)

Oleh
Rinaldo Farera
NIM. E1111161033

Dipertahankan di :

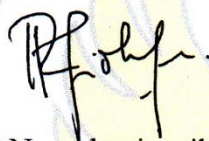
Pada Hari/Tanggal : Rabu, 29 Maret 2023

Waktu : 09.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang Sidang Hubungan Internasional

Tim Penguji

Ketua



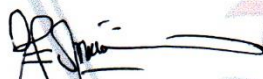
Dr. Nurfitri Nugrahaningsih, S.IP., M.Si
NIP. 197408102002122002

Sekretaris



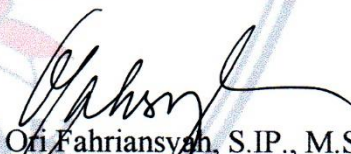
Dewi Suratiningsih, S.IP., M.A
NIP. 198609142019032005

Penguji Utama



Dr. Saherimiko, M.Si
NIP. 196605041995121001

Penguji Pendamping



Ori Fahriansyah, S.IP., M.Si
NIP. 196911222002121002

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP Untan



Dr. Herlan, M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai krisis migran Eropa pada tahun 2015 memicu krisis politik dan sosial di Jerman. Dalam menghadapi krisis ini, Kanselir Jerman Angela Merkel memperkenalkan kebijakan "*open door policy*" untuk menampung jutaan pengungsi dan migran yang masuk ke Jerman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan alasan Jerman mempertahankan kebijakan "*open door policy*" dalam menangani krisis migran Eropa di Jerman dengan teori politik luar negeri oleh Mark Webber dan Michael Smith menggunakan indikator kepemimpinan, faktor internal dan eksternal yang menyebabkan pengambilan kebijakan ini serta konsep migrasi internasional. Studi ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, makalah serta *website* dan artikel terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan "*open door policy*" sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan, faktor internal (*domestic determinants*) seperti lokasi geografis, trend demografi, kapabilitas ekonomi, struktur politik dan opini publik serta faktor eksternal (*international determinants*) seperti organisasi internasional, opini publik dunia dan reaksi negara lain dalam pengambilan kebijakan *Open Door Jerman* ini. Subjek dalam penelitian ini ialah Kebijakan *Open Door Policy*. Sedangkan Objek dalam penelitian ini ialah Negara Jerman. Meskipun kebijakan "*open door policy*" awalnya berhasil menampung jutaan pengungsi dan migran, namun kebijakan ini juga menimbulkan kontroversi dan tantangan politik bagi pemerintah Jerman. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan migrasi tersebut mempertimbangkan faktor internal dan eksternal serta peran kepemimpinan dalam perumusannya untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci : Migran, Kebijakan *Open Door*, Faktor Internal, Faktor Eksternal, Kepemimpinan.

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “*Open Door Policy* Terhadap Krisis Migran Eropa Di Jerman (2015-2019)”. Alasan memilih judul ini ialah peneliti tertarik dengan isu migrasi yang sangat relevan dengan kejadian beberapa tahun terakhir terutama ketika Jerman merupakan salah satu negara paling terpengaruh atas krisis migran Eropa tahun 2015. Meskipun telah banyak penelitian tentang krisis migran di Eropa, ada beberapa keterbatasan penelitian yang telah dilakukan tentang mengapa Jerman mempertahankan kebijakan pintu terbuka (*Open Door Policy*) yang diambil oleh Jerman pada periode 2015-2019 atas krisis migran tersebut. Krisis Migran dapat menjadi kontribusi baru dalam hubungan internasional khususnya studi tentang migrasi. Dalam konteks politik dan sosial, perumusan kebijakan ini merupakan hal yang kompleks yang menimbulkan dampak signifikan. Topik ini tidak hanya penting dari segi akademik, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan politik yang signifikan atas kontroversi yang dibuat. Adapun alasan lainnya peneliti memilih judul tersebut merupakan ketersediaan data. Selama tahun 2015-2019, Jerman merupakan negara Eropa dengan penerimaan migran terbanyak sehingga akses data dan informasi sangat mudah didapatkan peneliti untuk melakukan penggambaran dan analisis terhadap kebijakan *Open Door* dan dampaknya terhadap Jerman.

Adapun rumusan masalah yang diteliti pada skripsi ini ialah “Mengapa Jerman mempertahankan *Open Door Policy* tahun 2015-2019?” terhadap krisis migran Eropa. Dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut: “Apakah faktor kepemimpinan Angela Merkel menyebabkan *Open Door Policy* tahun 2015?”, “Apa saja faktor internal yang menyebabkan pengambilan kebijakan *Open Door*

Policy tahun 2015? “, “Apa saja faktor eksternal yang menyebabkan pengambilan *Open Door Policy* tahun 2015? .

Untuk segi manfaat teoritis penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi prodi/studi hubungan internasional sebagai referensi maupun acuan untuk penelitian selanjutnya di masa depan serta menambah pemikiran terhadap analisa Kebijakan *Open Door Policy* oleh Angela Merkel ini secara kualitatif dalam menggambarkan alasan mengapa Jerman mempertahankan *Open Door Policy* dalam teori Politik Luar Negeri serta konsep Migrasi Internasional. Sedangkan untuk manfaat praktis, penelitian ini diharapkan mendapatkan hasil penelitian yang memberikan kontribusi bagi beberapa pihak seperti pembaca terhadap krisis migrasi Eropa yang tidak hanya berdampak negatif tetapi juga ada sisi positifnya. Sehingga mendapatkan output berupa feedback bagi penulis atas kritik maupun saran untuk kedepannya atas *Open Door Policy* Jerman tahun 2015 . Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah serta pembuat kebijakan maupun GO, NGO dan INGO seperti *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), *International Organisation for Migration* (IOM), and *Amnesty International* serta EU (*European Union*) dan *Council of Europe* dalam memahami perspektif negara dan mengatasi isu migrasi Internasional.

Penelitian ini memberikan saran berdasarkan teori politik luar negeri Mark Webber dan Michael Smith terkait kebijakan luar negeri Jerman yang dikenal sebagai *Open Door Policy*. Saran-saran tersebut meliputi pemahaman perspektif kepemimpinan, faktor-faktor internal seperti lokasi geografis, trend demografi, kapabilitas ekonomi, struktur politik, dan opini publik, serta faktor-faktor eksternal

yang mempengaruhi keputusan Jerman. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah, pembuat kebijakan, organisasi internasional, dan stakeholders di masa depan terkait isu migrasi internasional.

Dalam penelitian tentang *Open Door Policy* ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif yang didukung dengan metode kualitatif. Peneliti menggunakan teori Politik Luar Negeri dari Mark Webber dan Michael Smith serta konsep Migrasi Internasional. Teori Politik Luar Negeri yang digunakan memiliki 3 indikator kunci yakni kepemimpinan, faktor internal (*domestic determinants*) serta faktor eksternal (*international determinants*). Sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa alasan Jerman mempertahankan kebijakan *Open Door Policy* ini antara lain kepemimpinan dari Angela Merkel yang mementingkan hak asasi manusia di atas segala sangat berpengaruh dalam kebijakan ini, selain itu faktor internal seperti lokasi geografis yang strategis karena ada di tengah Eropa, trend demografi yang menua dan membutuhkan tenaga kerja yang banyak atas industri yang maju, kapabilitas ekonomi yang mumpuni karena tahun 2015 Jerman merupakan negara dengan PDB kelima di dunia, struktur politik yang memadai dan opini publik yang walaupun sebagai kontra. Selanjutnya untuk faktor eksternal seperti organisasi internasional yang sangat mendukung hak asasi manusia migran sehingga mendesak Jerman untuk mematuhi aturan hingga menyediakan akomodasi yang layak bagi para migran, selain itu opini publik yang mayoritas mendukung reaksi negara lain yang mayoritas mendukung seperti Austria, Swedia, Finlandia, Belanda, Perancis serta Kanada walaupun Hungaria dan Ceko mengecam. Opini publik dunia seperti mayoritas Eropa dan Amerika Utara dan

mendukung juga sangat berpengaruh atas alasan Jerman mempertahankan *Open Door Policy* ini.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Rinaldo Farera

Nomor Mahasiswa : E1111161033

Program Studi : Hubungan Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Pontianak, 28 Februari 2023

Yang membuat pernyataan



10000
Rp
METERAI
TEMPEL
6B8F0AKX466605780
(Rinaldo Farera)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"In chess and in life, a single mistake doesn't define us. It's what we do next that counts."

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada Allah SWT atas segala berkatnya dalam segala kelancaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kepada orang tua, adik dan keluarga, dalam dukungan baik secara materil dan doa kepada penulis. Terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan serta doa yang dipanjatkan, sehingga penulis dapat mencapai titik akhir dalam perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
3. Kepada para sahabat satu perjuangan di prodi Hubungan Internasional Universitas Tanjungpura Angkatan 2016. Terima kasih atas waktu dan kenangan Bersama, serta motivasi untuk dapat menyelesaikan perkuliahan.
4. Kepada seluruh Dosen, Dekan, serta bagian Administrasi Fisip Untan, dalam membantu proses perkuliahan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya akhirnya penulisan proposal penelitian yang berjudul: “*Open Door Policy Terhadap Krisis Migran Eropa Di Jerman 2015-2019*“, ini dapat diselesaikan dengan baik tepat pada waktunya. Skripsi penelitian ini disusun sebagai tugas akhir dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

Selanjutnya penulis menyadari akan kekurangan dari penulisan proposal penelitian ini, karena hasil yang dicapai melalui proposal penelitian ini baru merupakan langkah awal dari suatu perjalanan panjang khasanah ilmu pengetahuan penulisan dapatkan. Keberhasilan dalam penulisan proposal penelitian ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan berbagai bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. Herlan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Ira Patriani, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, dan selaku dosen pembahas kedua, yang telah membimbing, memberikan saran dan arahan selama proses penyempurnaan skripsi ini.

3. Ori Fahriansyah, S.IP, M.Si selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional serta sebagai dosen akademik penulis, yang telah memberikan arahan dalam pengerjaan penelitian.
4. Dr. Nurfitri Nugrahaningsih, M.Si selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan kemudahan dan arahan. Memotivasi dan bimbingan selama proses penulisan proposal penelitian ini, baik secara metodologi penelitian serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
5. Dewi Suratiningsih S.IP, M.A selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam proses pembuatan skripsi ini.
6. Dr. Saherimiko, M.Si selaku Penguji Utama yang telah memberikan koreksi serta arahan agar skripsi ini bisa menjadi sistematis dalam susunan serta prosesnya.
7. Ori Fahriansyah, S.IP, M.Si selaku Penguji Kedua yang telah membantu dalam mengkoreksi serta mengarahkan skripsi ini menjadi lebih baik.
8. Seluruh dosen pengajar di Program Studi Hubungan Internasional, yang selama ini telah memberikan ilmu, bimbingan, serta motivasi selama masa perkuliahan penulis.

Pontianak, 22 Februari 2023



Rinaldo Farera

DAFTAR ISI

COVER	I
HALAMAN PENGESAHAN	II
ABSTRAK	III
RINGKASAN SKRIPSI.....	IV
PERNYATAAN KEASLIAN	VIII
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	IX
KATA PENGANTAR	X
DAFTAR TABEL.....	XV
DAFTAR GAMBAR	XVI
DAFTAR LAMPIRAN.....	XVII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah Penelitian	20
1.3 Fokus Penelitian.....	20
1.4 Rumusan Masalah	20
1.5 Tujuan Penelitian	21
1.6 Manfaat Penelitian	21
1.6.1 Manfaat Teoritis	21
1.6.2 Manfaat Praktis	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
2.1 Teori	23
2.1.1 Teori Politik Luar Negeri	23
2.2 Definisi Konsep.....	28
2.2.1 Migrasi Internasional.....	28
2.3 Hasil Penelitian yang Relevan	31

2.4 Kerangka Pikir Penelitian.....	35
2.5 Pertanyaan Penelitian	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1. Jenis Penelitian.....	38
3.2 Langkah-langkah Penelitian	39
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
3.3.1. Lokasi Penelitian	41
3.3.2. Waktu Penelitian	41
3.4. Subjek dan Objek Penelitian/Unit Analisis.....	42
3.5. Teknik Pengumpulan Data	43
3.5.1. Studi Kepustakaan	44
3.5.2 Dokumentasi.....	44
3.6. Instrumen dan Alat Pengumpulan Data	45
3.7. Analisis Data.....	46
3.7.1. Keabsahan Data	46
3.7.2 Teknik Analisis Data	47
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	49
4.1 Profil Negara Jerman.....	49
4.2 Kondisi Geografi dan Demografi Jerman	50
4.3 Konstitusi Negara Jerman.....	52
4.4 Sistem Pemerintahan Jerman	53
4.5 Sistem Ekonomi Jerman	55
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
5.1 Analisis Teori Politik Luar Negeri atas Open Door Policy Dalam Krisis Di Jerman Tahun 2015-2019	58
5.1.1 Kepemimpinan (<i>Leadership</i>)	58
5.1.2 Faktor Internal (<i>Domestic Determinants</i>).....	61
5.1.2.1 Lokasi Geografis	61
5.1.2.2 Kapabilitas Ekonomi	62

5.1.2.3 Trend Demografi	64
5.1.2.4 Struktur Politik	66
5.1.2.5 Opini Publik	69
5.1.3 Faktor Eksternal (<i>International Determinants</i>).....	73
5.1.3.1 Organisasi Internasional	73
5.1.3.2 Opini Publik Dunia.....	77
5.1.3.3 Reaksi Pemerintah Negara Lain.....	78
BAB VI PENUTUP	80
6.1 Kesimpulan	80
6.2 Keterbatasan Penelitian	85
6.3 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel	<i>halaman</i>
1.1 Waktu Penelitian	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar	halaman
1.1 Data Tahunan Jumlah Pemohon Suaka ke Jerman	3
2.1 Data Migran Berdasarkan Negara Pemohon	4
3.1 Rute Utama Migrasi ke Jerman	6
4.1 Faktor Penentu Kebijakan Luar Negeri Menurut Mark Webber dan Michael Smith.....	23
5.1 Permohonan Aplikasi Imigran di Jerman Tahun 2015-2019	30
6.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	35
7.1 Langkah-Langkah Penelitian Kualitatif	41
8.1 16 Negara Bagian Jerman.....	51
9.1 Kekurangan Tenaga Jerman	64
10.1 Persentase Populasi Menua di Jerman	65
11.1 Opini Publik Jerman terhadap Imigrasi.....	70
12.1 Opini Publik Jerman terhadap Kebijakan Angela Merkel	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	<i>halaman</i>
1.1 Daftar Riwayat Hidup	94
1.2 Surat Tugas Penelitian.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena *Arab Spring* yang disertai revolusi politik oleh para demonstran pada tahun 2010. *Arab Spring* menurut definisinya merupakan serangkaian protes anti-pemerintah di Timur Tengah yang membangkitkan semangat demokrasi atas ketidakpuasan terhadap sistem authoritarian yang menindas rakyat atas kegagalan keamanan atas pelanggaran hak asasi manusia, tingkat korupsi yang tinggi dan resesi ekonomi di berbagai negara di Timur Tengah yang dimulai di Tunisia (Abdelsalam, 2022).

Tujuan *Arab Spring* itu ialah menginginkan akan adanya pergantian sistem politik dan authoritarian menjadi demokrasi, yang artinya setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi di politik dan dapat mengeluarkan pendapatnya serta dalam mengharapkan masa depan yang cerah pada bidang ekonomi (Abdelsalam, 2022).

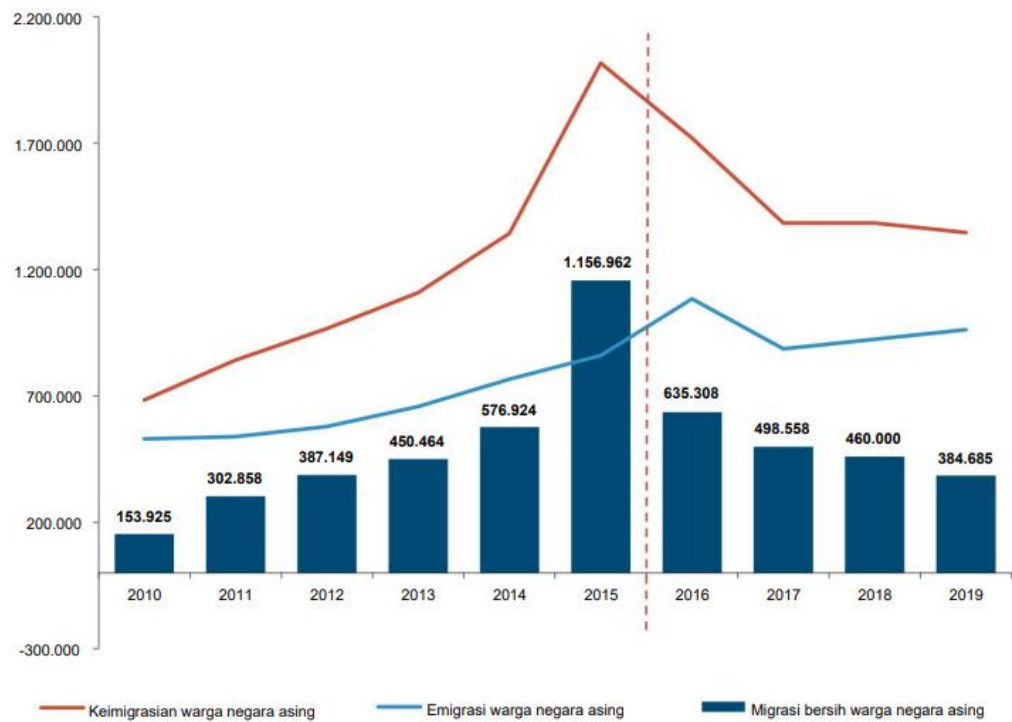
Ketidakpuasaan ini mulai mendorong revolusi politik tersebut di awal tahun 2011. Dengan dukungan media sosial, video tersebut direkam dan diupload sehingga viral lalu menyebabkan efek domino di Timur Tengah, rakyat Timur Tengah menolak atas Pemerintah yang diktaktor sehingga menginginkan revolusi terhadap sistem pemerintahannya. Dari Tunisia tersebut, negara-negara tetangga juga ikut protes terhadap pemerintahannya yaitu Libya, Mesir, Yaman, Suriah dan

Bahrain. Kanselir-Kanselir yang digulingkan yakni Zain El Abyadin Ben Ali, Koridor Jaddaf, Hosni Mubarak, di Ali Abdullah Saleh (Aljazeera, 2020).

Faktor internal seperti sistem authoritarian serta monarki absolut dinilai melanggar hak-hak kebebasan warga sipil karena rezim tersebut telah melemahkan hukum, tidak adanya separasi kekuatan dalam pemerintahan dan berkurangnya indeks demokrasi di suatu negara. Belum lagi atas kasus nepotisme di pemerintahan, resesi ekonomi dalam penurunan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan kurs mata uang serta tingkat pengangguran dan kemiskinan yang terus naik di berbagai wilayah Timur Tengah juga mendorong revolusi ini (Salam, 2015).

Arab Spring yang terus berkembang ini merupakan salah satu faktor adanya kenaikan arus imigrasi dari mayoritas negara Timur Tengah ini terhadap negara-negara di Eropa. Eropa sendiri mulai mencatat peningkatan jumlah kedatangan pengungsi pada tahun 2010 karena beberapa konflik di negara-negara di Timur Tengah, Asia dan Afrika, khususnya perang di Suriah, Irak dan Afghanistan, tetapi juga pemberontakan teroris di Nigeria dan Pakistan, dan pelanggaran hak asasi manusia di Eritrea, semuanya berkontribusi pada arus pengungsi. Jutaan migran awalnya mencari tempat perlindungan yang aman di negara-negara yang relatif stabil dan minim akan konflik (Salam, 2015).

Gambar 1.1
Data Tahunan Jumlah Pemohon Suaka ke Jerman



Sumber : Federal Statistic Office, 2019

Dalam statistik pemohon suaka tahunan di Jerman pada tahun 2010, jumlah pemohon suaka ke Jerman mencapai 153,925 orang. Kemudian tahun selanjutnya 2011, ada sejumlah 302,858 orang. Jumlah itu pun terus naik seiring waktu pada 2013, pemohon suaka Jerman menjadi 387,149 orang. Tahun berikutnya 2014, ada sekitar 576,924 migran datang ke Jerman. (Federal Statistic Office, 2019).

Kemudian gelombang krisis terbesar pun terjadi pada tahun 2015, Jerman saat itu mendapatkan 1,156.962 pemohon untuk masuk ke perbatasan Jerman. Lalu tahun berikutnya, ada pengurangan jumlah pemohon menjadi 636,308 orang.

Pada tahun 2017, ada sekitar 498,558 orang, dan pengurangan kembali terjadi pada 2018 dan 2019 masing-masing pada angka 460.000 dan 384,685 ketika Jerman memperketat perbatasannya (Federal Statistic Office, 2019).

Gambar 2.1
Data Migran Berdasarkan Negara Pemohon

EU Asylum applicants by origin		
Origin	2015	2016
Syria	362,715	334,815
Afghanistan	178,290	182,975
Iraq	121,585	127,090
Pakistan	46,510	47,655
Nigeria	30,000	46,245
Iran	25,400	40,210
Eritrea	33,110	33,370
Albania	66,145	29,145
Russia	18,395	23,045
Unknown	21,135	20,035
Rest of the world	354,450	322,225

Sumber: Eurostat, 2016

Pada tahun 2015, sebagian besar orang yang tiba di Eropa pada tahun 2015 adalah pengungsi yang melarikan diri dari perang dan penganiayaan di negara-negara seperti Suriah, Afghanistan, Irak, dan Eritrea: 84% migran tersebut datang lewat Laut Mediterania pada tahun 2015. Perang yang memicu krisis migran adalah Perang Saudara Suriah, Perang Irak, Perang di Afghanistan, Perang di Somalia dan Perang di Darfur. Pengungsi dari Eritrea, salah satu negara paling

represif di dunia, melarikan diri dari wajib militer tanpa batas waktu dan kerja paksa. (Eurostat, 2016).

Pada tahun 2015, Jumlah pengungsi dari Suriah berjumlah 362, 715 jiwa. Afghanistan berjumlah 178, 290 jiwa, Iraq berjumlah 121,585, Pakistan 46, 510 Nigeria berjumlah 30,000, Iran 25,400 jiwa dan negara lain sekitar 354,450 jiwa. Pada tahun 2016, jumlah pengungsi Suriah berkurang sekitar 1% menjadi 334,815, Afghanistan berjumlah 182,975 jiwa, Iraq berjumlah 127, 900 dan negara-negara lain berjumlah 322, 225 jiwa. (Eurostat, 2016).

Gambar 3.1
Rute Utama Migrasi ke Jerman



Sumber : BBC, 2015

Mayoritas migran dan pengungsi yang tiba di Jerman pada tahun 2015 sebagian besar melakukan perjalanan melalui negara-negara berikut:

- Turki: Banyak migran dan pengungsi menyeberang dari Turki ke Yunani dengan perahu atau darat (BBC, 2015).
- Yunani: Dari Turki, banyak migran dan pengungsi menyeberangi Laut Aegea untuk mencapai pulau-pulau Yunani, seperti Lesbos, lalu pindah ke daratan Yunani (BBC, 2015).

- c. Negara-Negara Balkan: Dari Yunani, banyak migran dan pengungsi pindah melalui Balkan, melewati negara-negara seperti Makedonia Utara, Serbia, Kroasia, dan Slovenia (BBC, 2015).
- d. Hungaria: Dari negara-negara balkan tersebut, banyak migran dan pengungsi menyeberang ke Hungaria sebelum melanjutkan perjalanan mereka ke Jerman (BBC, 2015).
- e. Austria: Dari Hungaria, banyak migran dan pengungsi masuk ke Austria sebagai destinasi terakhir sebelum akhirnya tiba di Jerman (BBC, 2015).

Perlu untuk dicatat bahwa banyak migran dan pengungsi juga melakukan perjalanan melalui negara atau rute lain (BBC, 2015).

Balkan Barat adalah istilah yang digunakan di Uni Eropa untuk menggambarkan enam negara di Eropa Selatan dan Timur yang dicakup oleh kebijakan ekspansi Uni Eropa yakni Republik Albania, Bosnia dan Herzegovina, Montenegro, Republik Kosovo, Republik Makedonia Utara, dan Republik Serbia (Mandic, 2017)

Rute Balkan Barat merupakan zona transit bagi para pengungsi dan migran dari Timur Tengah, Asia Barat dan Selatan serta Afrika bertujuan untuk menjangkau Eropa Barat dan Utara termasuk negara Jerman. Hampir satu juta orang melintasi Balkan Barat untuk memasuki Uni Eropa pada 2015-2016 (Mandic, 2017)

Migran yang melewati rute balkan barat ini melewati 4 fase yaitu fase pertama, fase kedua, fase ketiga dan fase keempat melewati negara seperti Turki, Yunani, Makedonia, Serbia, Kroasia, Slovenia, Austria, Hungaria dan terakhir Jerman. (Mandic, 2017)

Fase pertama, pada tahun 2015, jumlah pengungsi Suriah yang tiba di Turki dan kemudian ke Yunani meningkat secara signifikan, dengan sebagian besar bertujuan untuk bergerak ke utara melalui Balkan. Fase awal ini menyebabkan negara penerima terkejut terutama respons akan imigrasi ini, negara-negara di sepanjang rute berhasil menerima para migran, memberi mereka tempat tinggal dan makanan dan alamat langsung mereka kebutuhan. Pusat penerimaan pertama di Serbia dibuka pada Juli 2015 di Preševo, dekat perbatasan dengan Makedonia Utara. Ini berfungsi sebagai titik pendaftaran utama para migran di sepanjang rute. Pembukaannya sangat penting karena semakin banyak migran yang membutuhkan dukungan kemanusiaan. (Golubovska, 2017)

Jumlah migran yang hadir di Serbia meningkat tidak hanya di sepanjang perbatasan dengan Makedonia Utara tetapi juga di kota-kota Serbia yang berbatasan dengan Hungaria, dari mana penyeberangan perbatasan yang tidak terkendali ke Hungaria terjadi. Sebagai tanggapan, pusat penerimaan lain dibuka di Kanjiža, Serbia pada Agustus 2015. Jumlah migran transit di Serbia terus meningkat, Beograd di Serbia menjadi hub sentral di sepanjang rute di mana orang yang bepergian dapat beristirahat dan memperoleh informasi tentang perjalanan selanjutnya. Selama fase pertama ini, sekitar 1.000 migran sering mengunjungi taman di pusat kota setiap hari. Seperti kebanyakan orang melanjutkan perjalanan

mereka menuju Hungaria dan Eropa Barat, masa tinggal mereka di Serbia terbatas pada beberapa hari (Brmbeska, 2018).

Fase kedua, sementara Makedonia Utara mengamandemen Undang-Undang Suaka dengan cara memungkinkan transit yang difasilitasi (terutama oleh kereta api dan bus) melalui wilayahnya, pihak berwenang Hungaria menanggapi peningkatan arus dengan mendirikan *border control* dengan pagar sepanjang perbatasan dengan Serbia. Kebijakan tersebut mendapatkan efek langsung pada rute migrasi, yang bergeser ke Kroasia, Slovenia dan Austria. elain itu, beberapa negara di sepanjang rute menanggapi dengan penutupan sesekali dari mereka perbatasan sendiri (Brmbeska, 2018).

Pendekatan yang tidak terkoordinasi ini memuncak dalam perselisihan antara Serbia dan Kroasia dan penutupan penuh perbatasan bersama mereka. Saat rute bergeser menuju Kroasia, pemerintahnya merespons dengan mengatur transportasi para migran yang lewat, daripada membiarkan mereka bergerak bebas melintasi negara Kroasia (Sardelić, 2017).

Keputusan Angela Merkel untuk mengizinkan warga Suriah mengajukan suaka di Jerman meskipun telah memasuki Uni Eropa melalui Negara anggota lain menghasilkan rekor jumlah orang yang pindah ke Jerman (Sardelić, 2017).

Pada bulan Oktober 2015, lebih dari 180.000 orang telah terdaftar di pusat penerimaan di Preševo (Serbia) dengan lebih dari 10.000 penyeberangan yang menjadikan pusat ini sebagai titik pendaftaran terpenting di sepanjang rute. (UNHCR, 2016).

Selama fase kedua ini, Uni Eropa mengadopsi Rencana Relokasi Darurat, yang bertujuan untuk merelokasi hingga 160.000 pengungsi (terutama Suriah, Eritrea, dan Irak) dari Italia dan Yunani ke negara-negara anggota lainnya selama suatu periode dari dua tahun. Karena negara-negara Visegrad (Republik Ceko, Hongaria, Polandia dan Slovakia) menolak rencana ini, hanya 35.000 orang yang dipindahkan berdasarkan rencana ini berdasarkan data pada tahun 2019 (UNHCR, 2016).

Pada fase ketiga, sejak 2015 wacana publik dan liputan media tentang migrasi ke Eropa menjadi semakin keras. Publik dan media tidak hanya mempertanyakan tanggapan keseluruhan Eropa terhadap migrasi yang masuk, tetapi juga penerimaan migran pada prinsipnya. Tidak mengherankan, liputan media di seluruh Uni Eropa berfokus pada menilai krisis perbatasan Eropa, 'serangan' di Eropa difasilitasi oleh *Open Border Policy* dan ketakutan akan terorisme yang diakibatkannya. Sentimen anti-migran menjadi lebih kuat di seluruh Uni Eropa dan negara-negara Balkan Barat. Para pembuat kebijakan bereaksi dengan memperkenalkan langkah-langkah pembatasan baru di seluruh Eropa (Petronijevic, 2017)

Pada 24 Februari 2016, Kepala Polisi dari semua negara di sepanjang rute Balkan mengesahkan Deklarasi 'Mengelola Migrasi Bersama', yang mengakibatkan 'penutupan' rute pada Maret 2016. Dianggap sebagai bertentangan dengan hukum pengungsi internasional dan hak asasi manusia Deklarasi ini menyerukan standar umum pendaftaran dan penerapan kriteria masuk yang ketat.

Hal ini mengakibatkan pengenalan kuota, pertama oleh Austria dan kemudian oleh semua negara lain di sepanjang rute (Petronijevic, 2017).

Pernyataan Uni Eropa-Turki Maret 2016 secara signifikan mengurangi jumlah migran yang tiba di UE dan melintasi Balkan. Penutupan perbatasan, bagaimanapun, mengakibatkan peningkatan manusia, penyelundupan, yang mengekspos kurangnya kontrol, sementara juga mengangkat berbagai masalah hak asasi manusia (Santic, 2017).

Balkan barat dengan demikian berakhir sebagai zona penyangga antara Yunani dan Bulgaria di satu sisi, dan Hungaria dan Kroasia, yang telah memutuskan untuk menutup perbatasan mereka sepenuhnya, di sisi lain. Ini semua adalah anggota Uni Eropa. Situasi politik yang relatif tidak stabil di Balkan, perubahan kondisi di negara-negara asal dan munculnya atau hilangnya rute alternatif (misalnya rute Mediterania Tengah melalui Libya dan Mediterania Barat melalui Maroko) semuanya berdampak pada migrasi yang disaksikan di sepanjang rute Balkan. (Santic, 2017).

Migran ini melewati *Schengen Area* yang merupakan area tanpa *internal border* dimana warga Uni Eropa serta non-warga Uni Eropa dapat melakukan perjalanan tanpa dikenakan pemeriksaan perbatasan. Peraturan ini diperkenalkan sejak 1985, mencakup hampir semua Negara Anggota UE dan beberapa negara non-UE terkait sehingga warga Uni Eropa serta Non Uni Eropa dapat melakukan perjalanan dengan bebas dan aman di dalam Uni Eropa (European Commission, 2015).

Area tersebut berjumlah 26 negara Schengen yaitu Austria, Belgia, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Islandia, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luksemburg, Malta, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Swiss (European Commission, 2015).

Berdasarkan riset dari *The International Organization for Migration* (IOM) tahun 2015 migran tersebut masuk ke Eropa melalui jalur darat serta laut. Diperkirakan jumlah imigran tersebut 1,011,700 orang masuk lewat laut serta 34.900 orang masuk lewat darat. Dibandingkan tahun sebelumnya 2014, hanya sekitar 280.000 migran yang masuk lewat jalur laut. (BBC, 2015). Sehingga pada akhir tahun 2015, Eropa mencatat 1.216.860 imigran, mayoritas dari mereka melewati jalur utara yang disebut sebagai *Balkan route* (Dockery, 2017).

Data Pengungsi dari Eropa tahun 2015 menunjukkan bahwa adanya 1.216.860 pengungsi yang memohon untuk masuk ke Uni Eropa sendiri lebih dari dua kali lipat jumlah permohonan dari tahun sebelumnya. Sekitar 66% dari total permohonan ke Uni Eropa ini didapat oleh negara mayoritas Uni Eropa yang mendapatkan permohonan tersebut antara lain, Jerman, Austria, Hungaria dan Swedia (Eurostat, 2015).

Dalam mengatasi kenaikan imigran, Uni Eropa sendiri memiliki Undang-Undang Imigrasi yang mengacu pada *Dublin Regulation III*, yang dilatarbelakangi oleh Dublin Convention 1990 di Irlandia, para Komisi memberi usulan agar melakukan *interview* secara sistematis untuk mendapatkan informasi pencari

suaka yang dibuat atas tujuan untuk menentukan negara mana yang memeriksa permohonan suaka, yang biasanya negara tempat imigran pertama kali datang serta untuk memastikan setiap klaim pemeriksaan yang adil dalam suatu negara anggota berdasarkan Konvensi Jenewa Tahun 1951 dan Petunjuk Kualifikasi UE di dalam Uni Eropa. Sistem Dublin ini mengacu pada standar umum yang setara, di mana negara anggota mengizinkan pencari suaka untuk mendapatkan perlindungan yang sama di semua negara anggota Uni Eropa tanpa adanya diskriminasi (UNHCR, 2021),

Tujuan dari *Dublin Regulation III* ialah membatasi jumlah imigran yang masuk pada negara-negara anggota, *Dublin Regulation III* adalah undang-undang yang disetujui Uni Eropa yang mengharuskan setiap negara bertanggung jawab untuk mengecek dan mengidentifikasi aplikasi suaka para migran. (UKANDEU, 2021). Peraturan ini biasanya ditetapkan pada negara pertama para migran itu tiba. Peraturan Dublin berlaku untuk Negara Anggota UE dan Islandia, Norwegia, Swiss, dan Liechtenstein. Negara-negara tersebut terikat oleh Peraturan Dublin hingga 31 Desember 2020.

Pada tanggal 25 Agustus 2015, Angela Merkel menangguhkan atau memberhentikan sementara peraturan *Dublin Regulation III* oleh Uni Eropa untuk imigran Suriah, Irak serta Afghanistan atas krisis imigran Eropa tahun 2015. Alasan pengangguhan tersebut karena Angela Merkel tidak setuju atas Peraturan tersebut berarti bahwa negara-negara Uni Eropa di Mediterania dipaksa untuk menerima sebagian besar migran, yang sebagian besar datang melalui jalur laut. Menurutnya, itu tidak adil untuk Italia dan Yunani karena mereka merupakan

negara pertama yang dihampiri pencari suaka, ia menginginkan distribusi yang adil ke seluruh negara Uni Eropa (DW, 2017),

Penangguhan *Dublin Regulation III* tersebut berarti mengizinkan imigran Suriah mendaftarkan aplikasi imigran setelah datang di Jerman, walaupun mereka melewati negara lain di Eropa. Lalu pada tanggal 31 August 2015, Angela Merkel sebagai kanselir Jerman mengatakan *Wir schaffen das* yang artinya kita dapat menyelesaikan ini saat mengunjungi kamp pengungsi. Ketidaksetujuan atas Dublin Regulation III ini berlanjut hingga ia menangguhkan peraturan tersebut mengumumkan kebijakan *Open Door Policy* itu secara resmi diaplikasikan. (BBC, 2015). Kebijakan *Open Door* merupakan istilah dalam studi hubungan internasional dimana suatu negara membuka perbatasannya untuk segala migran tanpa adanya proses deteksi atau pengecekan dokumen. Namun, dalam pengaplikasiannya, tidak melibatkan parlemen maupun suara publik (Nienaber, 2016).

Alasan penangguhan ini ialah *Dublin Regulation III* tersebut dianggap melanggar Pasal 3 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, hak atas kebebasan dari perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Aturan, yang berlaku sejak 1990, menuntut pencari suaka dikembalikan ke negara UE tempat mereka pertama kali tiba. Sehingga, ini berarti banyak pengungsi dipindahkan ke Yunani, Malta dan Italia, negara-negara yang berjuang untuk mengatasi kedatangan ratusan atau ribuan orang setiap hari melintasi Mediterania. Penampungan dan perawatan di negara-negara ini seringkali tidak memadai baik

untuk pengungsi baru maupun yang kembali, dalam beberapa kasus, diklaim, bahkan bertentangan dengan hak asasi manusia (Hall, 2015).

Sehingga mendorong Angela Merkel dan Pemerintah Jerman membuat peraturan baru, yang menjadi melainkan pedoman untuk perlakuan terhadap pengungsi Suriah di Jerman. Peraturan tersebut memungkinkan penangguhan sementara terhadap kelompok tertentu. Dalam hal ini, warga Suriah yang mengajukan status pengungsi di Jerman tidak akan lagi diminta untuk mengungkapkan di mana mereka pertama kali memasuki UE dan klaim suaka mereka akan diproses terlepas dari klaim sebelumnya yang dibuat (Hall, 2015).

Prinsip yang mendasari kebijakan *Open Door* tersebut ialah *welcome culture* yang mempromosikan sikap penerimaan atas dasar toleransi dan integrasi dengan imigran. Tetapi pada kenyataannya, ini malah menimbulkan perpecahan antara warga Jerman yang pro dan kontra atas kebijakan ini. Warga yang pro atas kebijakan ini memberikan uang, akomodasi darurat dan makanan kepada pengungsi yang datang sedangkan yang kontra mengkritik dan menanggapi imigran tersebut akan menimbulkan gerakan radikal baru di Jerman. Angela Merkel juga menganggap bahwa situasi tahun 2015 tersebut merupakan konflik yang luar biasa dan melihat dari perspektif kemanusiaan dan politik. Namun, partai oposisi dari sayap kanan *Alternative for Germany* (AfD) mengecam kebijakan tersebut (Baume, 2017). Kemudian pada 31 Agustus 2015, Angela Merkel mengeluarkan statement *Wir schaffen das* yang berarti Kita bisa menghadapi ini yang menjelaskan isu tersebut merupakan tugas negara. (Dockery, 2017)

Dalam pengaplikasiannya, *Open Door Policy* ini pada sempat diakhiri sementara pada September 2015, Pemerintah memperkenalkan kebijakan baru dimana Jerman memperketat kontrol perbatasan khususnya pada area barat. Pemerintah mengklaim bahwa adanya alasan keamanan yang mendesak. Kontrol perbatasan dimaksudkan untuk menekan jumlah imigran yang masuk terutama puluhan ribu imigran dari Suriah yang dilanda perang saudara. Keputusan tersebut menandai perubahan haluan yang mengejutkan dalam sikap Jerman terhadap krisis pengungsi Eropa (Meiritz, 2015).

Pada tahun 2015, Pemerintah Federal mengeluarkan dana sekitar 6 milyar euro dari dana awal sekitar 4,3 milyar euro menjadi total 10.3 milyar euro. Pemerintah negara akan menerima €3 miliar untuk perumahan dalam membantu mereka menampung 800.000 orang yang diperkirakan akan tiba di Jerman tahun 2015, dan pemerintah pusat berencana untuk membebaskan 3 miliar euro lagi untuk mendanai pengeluarannya sendiri, seperti membayar tunjangan bagi imigran baru (DW, 2016). Kemudian, Pemerintah Jerman pada tahun 2016 memberikan 9,3 miliar euro kepada enam belas negara bagiannya untuk membantu para migran dan 11 miliar euro untuk langkah-langkah yang dirancang untuk menyelesaikan krisis migrasi dan pemulangan imigran ke luar negeri.

Pada konferensi yang digelar *Christian Democratic Union* (CDU) tahun 2016. Kebijakan *Open-Door Policy*, dikritik oleh oposisi Pemerintah Jerman, mereka menginginkan pembatasan jumlah migran yang dituding merugikan anggaran finansial Jerman. Oposisi pemerintah *Alternative for Germany* atau AfD ini ingin mendeportasi imigran dan membuat kebijakan yang mirip Austria yang dimana, Austria memperkenalkan kebijakan suaka yang lebih ketat, dan mulai tahun 2016, kebijakan ini dianggap sukses mengurangi jumlah migran terutama karena perbatasan negara-negara di sepanjang jalur Balkan diperketat bagi migran yang ingin lewat (DW, 2018).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan Jerman untuk mempertahankan Open Door Policy dalam krisis migran Eropa. Pertama, Jerman memiliki tradisi kemanusiaan yang kuat dan dianggap sebagai negara yang ramah pengungsi. Kedua, kebijakan ini juga dipandang sebagai upaya untuk mengatasi masalah demografi dan ekonomi Jerman, di mana populasi dan tenaga kerja Jerman semakin menua dan kurang produktif (DW, 2018).

Negara tetangga Jerman yang menjadi pembanding dalam hal ini adalah negara-negara seperti Austria dan Hungaria, yang memilih untuk membatasi atau bahkan menutup *border* mereka bagi para pengungsi selama krisis migran Eropa. Keputusan ini diambil karena beberapa alasan, termasuk kekhawatiran mengenai keamanan, peningkatan tekanan pada infrastruktur dan layanan publik, dan masalah politik dalam negeri. Namun, pendekatan ini menuai kontroversi di kalangan masyarakat internasional dan dianggap sebagai kebijakan yang kurang berpihak pada kemanusiaan dan hak asasi manusia (DW, 2018).

Terlepas dari pro-kontra tersebut, dampak positif terhadap kenaikan jumlah imigran tersebut menyebabkan Jerman yang kehilangan demografi dan penurunan ekonomi Jerman dapat terselamatkan. Jerman mengalami kekurangan tenaga kerja akibat demografi pekerja yang masyarakatnya semakin tua. Jerman juga kehilangan *skilled workers* akibat penuaan tersebut akibatnya memerlukan imigran tersebut untuk dilatih agar dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja dalam negeri. Jumlah pekerja yang banyak tersebut juga dapat menambah GDP dalam negeri dan menambah dana pensiunan (DW, 2015).

Kemudian pada tahun 2016, Anggota parlemen Jerman atau *Bundestag* telah mengesahkan serangkaian undang-undang tentang deportasi, pemantauan, dan akses ke data pribadi pencari suaka. Imigran yang tidak memenuhi persyaratan akan lebih mudah dideportasi atau dipantau dengan gelang elektronik. Jerman tidak langsung mendeportasi ke negara-negara asal tetapi membuat perjanjian ke Maroko, Aljazair dan Tunisia sebagai negara aman untuk tujuan deportasi. (Nasr, 2016)

Dengan ketatnya perbatasan ditambah adanya Perjanjian Uni Eropa dan Turki berdampak pada kurangnya imigran yang masuk tahun 2016. Perjanjian Uni-Eropa dan Turki sendiri merupakan perjanjian yang ditandatangani pada Maret 2016. Perjanjian ini berisi kerja sama sebagai *statement of cooperation* Pemerintah Turki dan berbagai negara Uni Eropa lainnya. Perjanjian ini memiliki 3 poin utama dimana, Turki akan mengambil tindakan apa pun yang diperlukan untuk menghentikan imigran dari Turki ke pulau-pulau kecil di Yunani. Migran yang datang ke pulau tersebut akan dipulangkan ke Turki sebagai tempat transit.

Untuk setiap warga Suriah yang kembali dari pulau-pulau tersebut, Negara-negara Anggota Uni Eropa akan menerima satu pengungsi Suriah yang telah menunggu di dalam Turki. Sebagai gantinya, Turki akan menerima bantuan sebesar 6 miliar Euro untuk memperbaiki krisis kemanusiaan yang dihadapi para pengungsi di negara itu, dan warga negara Turki akan diberikan perjalanan bebas visa ke Eropa. (Terry, 2021)

Barulah pada 20 Agustus 2019, Undang-Undang Imigrasi Pekerja Terampil dan Undang-Undang tentang Penangguhan Sementara Deportasi untuk Pelatihan dan Ketenagakerjaan diterbitkan dalam Lembaran Hukum Federal Jerman. Tujuan dari Undang-Undang Imigrasi Pekerja Terampil adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih selektif dan peningkatan skill pekerja dari negara berkembang. Ini ialah cara Jerman memperketat perbatasan dan juga memproteksi ekonominya sendiri agar memiliki pekerja yang mempunyai skill di bidangnya. Kebijakan ini berarti menghentikan *Open Door Policy* dari Angela Merkel yang fokus pada bantuan kemanusiaan dan meminimalisir isu imigrasi. (LOC, 2019)

Pada penelitian ini, peneliti menggambarkan *Open Door Policy* terhadap krisis migran di Eropa tahun 2015. Penelitian ini berjudul *Open Door Policy Terhadap Krisis Migran Eropa Di Jerman (2015-2019)*.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan penulis di atas, identifikasi masalah penelitian yang dapat dirincikan ialah sebagai berikut :

- 1) Fenomena *Arab Spring* terhadap peningkatan arus pengungsi ke Eropa
- 2) Keputusan Angela Merkel terhadap mempertahankan *Open Door Policy*
- 3) Penangguhan terhadap Dublin Regulation III

1.3 Fokus Penelitian

Atas dasar latar belakang di atas, penulis menyebut bahwa *Open Door Policy* dari Angela Merkel sebagai Kanselir Jerman merupakan aktor utama atas isu krisis migrasi Eropa tahun 2015. Supaya penelitian tidak keluar dari topik, maka penulis akan memfokuskan masalah utama yaitu alasan Jerman mempertahankan *Open Door Policy* setelah terjadinya salah satu krisis migrasi terbesar Eropa di era modern yaitu tahun 2015-2019.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis, rumusan masalah yang bisa dibuat dalam penelitian ini ialah “Mengapa Jerman mempertahankan *Open Door Policy* tahun 2015-2019?”.

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tentu saja memiliki tujuan tertentu yang mendetail dan signifikan. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis dan menggambarkan pengaruh dalam pengambilan kebijakan *Open Door Policy* oleh Jerman dalam krisis migran Eropa melalui konsep dan teori yang relevan serta data-data yang mumpuni sehingga dapat dijadikan referensi studi Hubungan Internasional di masa depan.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini penulis harap akan bermanfaat bagi prodi/studi hubungan internasional sebagai referensi maupun acuan untuk penelitian selanjutnya di masa depan serta menambah pemikiran terhadap analisa Kebijakan *Open Door Policy* oleh Angela Merkel ini secara kualitatif dalam menggambarkan alasan mengapa Jerman mempertahankan Open Door Policy dalam teori Politik Luar Negeri serta Migrasi Internasional.

1.6.2 Manfaat Praktis

Setelah mendapatkan hasil penelitian, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi bagi beberapa pihak diantaranya :

- a. Diharapkan hasil dari penelitian ini menambah perspektif pembaca terhadap krisis migrasi Eropa yang tidak hanya berdampak negatif tetapi juga ada sisi positifnya. Sehingga mendapatkan output berupa feedback bagi penulis atas kritik maupun saran untuk kedepannya atas *Open Door Policy* Jerman tahun 2015 .
- b. Penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi pemerintah serta pembuat kebijakan maupun GO, NGO dan INGO seperti United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), the *International Organisation for Migration* (IOM), and *Amnesty International* serta EU (*European Union*) dan *Council of Europe* dalam mengatasi isu migrasi Internasional.